

EKONOMI ISLAM SEBAGAI *RAHMATAN LIL-ALAMIN*

Hamli Syaifullah¹

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI-UMJ)

Abstract

Islamic economic revival is to prove that the teachings of Islam as a comprehensive teaching concept, gives *rahmatan lil-alamin* for all beings in this world. *Rahmatan lil-alamin* in Islamic economics is a fundamental essence transformed into justice. Where justice created in Islamic economics seeks to reduce social disparities present in everyday life. Social disparity has created a gap between the haves and the have nots, so that socio-economic conflicts arose among the people, which led to divisions among the people. To obtain the data, facts, information that will reveal and explain the problem, use descriptive method with qualitative approach, the research methodology literature (library research), which conducted a study of books and other information related to the issues discussed in order to gain a clear and field research (field research), which the author conducted a study to go directly to the object of research. The purpose of this study is to know exactly how significant the impact of the implementation of Islamic economic to reduce disparity of the economy, which emphasizes the value of equity in it. Based on the results of this study can be seen that assistance contained in the Islamic economy by providing equal opportunity in the form of capital, either through equity business (*mudharabah* and *musharakah*) or social capital (zakah, infak, sadaqa, wakaf, hibah) have a significant impact improved livelihoods of the people.

Keywords: Islamic economic, *rahmatan lil-alamin*, justice

Abstrak

Kebangkitan ekonomi Islam adalah untuk membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif yang sifatnya *rahmatan lil-alamin* bagi semua makhluk di dunia ini. *Rahmatan lil-alamin* dalam ekonomi Islam adalah hal mendasar menuju kehidupan yang berkeadilan, dalam konteks mengurangi kesenjangan sosial dalam kehidupan. Karena kesenjangan yang terjadi menimbulkan *gap* atau pemisah antara kaum *aghniya* (kaya) dengan kalangan *fuqara* (fakir/miskin), yang berdampak pada munculnya konflik sosial.

Dalam memperoleh data, digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, studi pustaka, yang melakukan studi tentang buku dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak dari pelaksanaan ekonomi Islam dalam mengurangi kesenjangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan dalam konteks kerjasama, baik dalam bentuk modal (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau bantuan sosial (zakat, infak, sedekah, waqaf, hibah) ternyata mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan.

Kata Kunci: ekonomi Islam, *rahmatan lil-alamin*, keadilan

¹ Sedang Menempuh Pendidikan Syariah (Perbankan Syariah) pada Fakultas Agama Islam-Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI-UMJ).

I. PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi yang berkembang pada saat sekarang ini tidak terlepas dari kajian ekonomi yang telah dilakukan oleh beberapa ulama terdahulu. Sehingga kajian yang ada pada saat sekarang ini hanya pengembangannya saja. Lebih tepatnya adalah esensi dari ruh yang lebih dahulu dibangun oleh para ulama terdahulu. Sedangkan beberapa tokoh ekonomi barat sebagai pengadopsi benih-benih pengetahuan yang telah dikembangkan oleh ulama Islam terdahulu.

Adopsi ilmu ekonomi yang telah dikembangkan oleh ekonom barat, banyak yang telah dimodifikasi dan dijauhkan dari unsur-unsur keislaman. Di mana unsur agama merupakan pondasi yang terpenting dalam sebuah tatanan ilmu ekonomi. Hal inilah yang melatarbelakangi dihidupkan dan dikembangkannya kembali Ilmu Ekonomi Islam. Sebuah Ilmu Ekonomi yang lebih mengedepankan nilai-nilai *Falah*, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan.

Sebagai seorang muslim yang berpengetahuan, seharusnya kita mulai meluruskan pendapat yang salah tentang konsep ekonomi yang berkembang selama ini, khususnya ekonomi konvensional barat, yang melandaskan ilmu ekonomi pada pragmatisme semata, setelah dijauhkan dari unsur-unsur ke-Islaman. Sehingga yang terjadi adalah bumerang terhadap diri manusia sendiri dari penciptaan ilmu yang dihasilkan oleh olahan otaknya. Tak heran jika terjadi bencana dimana-mana, seperti yang ada dalam Alquran:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar-Ruum: 41).

Menurut penulis, ini merupakan akibat dari ketidakberdayaan teori ekonomi konvensional dalam menerapkan teori ekonominya, sehingga teori yang ada menjadi bumerang belaka bagi kehidupan ini. Selain kerusakan, kelaparan pun terkadang melanda di berbagai daerah. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Yunus² bahwa 94% dari pendapatan dunia dinikmati oleh 40% penduduk dunia, sedangkan sisanya yaitu 60% dari penduduk dunia hanya menikmati 6% dari pendapatan dunia. Sebuah ketimpangan yang sangat mencolok sekali. Hal ini terjadi karena adanya pelepasan antara *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) sebebas-bebasnya ke pasar. Sehingga terciptalah disparitas ekonomi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin.

Pendapat tersebut apabila dikorelasikan dengan realitas di Indonesia, tentunya sangat tepat sekali. Di mana limpahan kekayaan alam yang terbentang dari Sabang Sampai Merauke seolah tak berkorelasi positif terhadap kesejahteraan ekonomi secara merata. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan akses yang diperoleh oleh sebagian kecil elit ekonomi/pebisnis yang lebih mengedepankan individualisme, di mana individualisme-pragmatis merupakan sifat yang dilahirkan dari adanya kapitalisme yang semakin mencengkram, dan bahkan ahir-ahir ini kapitalisme berevolusi menjadi neoliberalis-kapitalisme.

² Muhammad Yunus (Diterjemahkan oleh Irfan Nasution). *Bank Kaum Miskin* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007); h. 256.

Semua konflik yang terjadi di dunia ini, entah konflik sosial yang terjadi di antara sesama manusia maupun konflik yang disebabkan oleh alam, atau lebih dikenal dengan bencana alam, merupakan dampak dari diterapkannya ilmu ekonomi konvensional. Dalam ilmu ekonomi konvensional, lebih mengedepankan rasionalitas individu untuk memenuhi *scarcity* (kelangkaan). A. Prasetyanto³ menyatakan bahwa ketika semuanya berbasis pada rasionalitas individu dalam rangka memaksimalkan nilai dan keuntungan pribadi, segala sesuatu diperjualbelikan tanpa ada prinsip keramahan, timbal balik atau redistribusi, pembalakan hutan, jual beli ijin tambang, korupsi adalah gejala-gejala yang muncul karena basis ekonomi yang terlalu mekanistik.

Akan tetapi berbeda dengan teori Ekonomi Islam yang mulai dicoba untuk dibangun kembali setelah sempat terputus beberapa dekade. Tujuan dari ekonomi Islam tidak semata-mata pragmatis-individualistis, akan tetapi ada tujuan lain yang dicari dalam melakukan transaksi ekonomi, yaitu *Falah*. Dalam arti leteral yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Sedangkan dalam pengertian Alquran adalah keberuntungan jangka panjang dunia dan akhirat.⁴

Inilah bentuk implementasi ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, yaitu membawa misi seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu *rahmatan lil-alamin*, sehingga bukan hanya manusia saja yang merasa berkah, alam pun ikut merasakan keberkahan adanya agama Islam dengan sistem ekonomi yang dimilikinya. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk memaparkan bagaimana kemampuan ajaran Islam dalam memberikan solusi terhadap konflik ketidakadilan ekonomi yang selama ini melanda dunia khususnya Indonesia, yaitu dengan menghadirkan kembali sistem ekonomi Islam yang merupakan sistem ekonomi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan secara mendalam.⁵ Dalam metode penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶ Metode ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu suatu metode menentukan, menggambarkan, mengklasifikasi dan mengumpulkan data (informasi yang tepat, benar, valid dengan menggunakan teknik Studi Pustaka).

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu sebuah studi untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisis lebih dalam lantaran hubungan-hubungannya.⁷ Pendekatan yang dilakukan adalah empiris, yaitu subjek kegiatan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

³ A. Prasetyantoko. *Modul Literasi Ekonomi* (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2012); h. 20.

⁴ Ditulis oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo, 2008); h. 2.

⁵ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993); h. 309.

⁶ Sunadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004); h. 76.

⁷ Muhammad Nazin. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998); h. 328.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sektor Moneter dalam Ekonomi Islam

1. Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Islami

Sejarah perkembangan moneter Islami tentunya tidak akan bisa dipisahkan dengan sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Karena pada zaman inilah pondasi keuangan Islam mulai terbentuk ke permukaan. Menjadi sebuah sistem yang dipakai pada saat itu dan diwariskan hingga pada zaman sekarang. Sebuah ruh moneter yang bersumberkan filsafat Islam.

Sebenarnya sistem moneter dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan setiap masa. Beberapa masa pernah menguasai zaman dengan sistem moneter yang dimilikinya, seperti kapitalis yang pernah menguasai dunia dengan imperialismenya dan sisa-sisa imperialismenya pun masih tersisa pada saat sekarang, yaitu neo-liberalisme yang merupakan imperialisme modern. Sementara sosialisme yang pernah berjaya pun telah runtuh, dan kini pun mulai dibangun kembali oleh negara China dan beberapa negara komunis lainnya.

Bagaimana dengan sistem moneter Islam? Moneter Islam merupakan sebuah sistem yang bersumber dari filsafat Islam. Penekanannya pun lebih bertendensi pada ruh dan filosofi untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga dalam sistem moneter Islam tidak hanya menekankan pada kepentingan dunia saja. Hal tersebut seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Uang dan perbankan sangatlah penting dalam sistem moneter Islam. Karena keduanya memiliki peranan signifikan untuk menunjang perekonomian suatu negara. Maka dari itu uang dan perbankan akan dibahas lebih spesifik dalam tulisan ini.

Sistem keuangan pada masa Rasulullah SAW menggunakan *bimetic standard* yaitu emas dan perak (dinar dan dirham). Karena keduanya merupakan alat pembayaran yang sah dan beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada masa Rasulullah SAW ini relatif stabil dengan nilai kurs dinar dan dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya *disequilibrium* antara *supply and demand*. Misalnya, pada masa pemerintahan Umayyah rasio kurs antara dinar dirham 1:12, sedangkan pada masa Abbasiyah berada pada kisaran 1:15.⁸

Kedua uang tersebut memiliki nilai intrinsik yang sangat stabil sekali. Terbukti sampai saat sekarang pun nilai tukar emas dan perak masih mahal dan stabil. Kestabilannya tidak terikat dengan instrumen moneter lainnya. Walaupun apabila kita melihat pada masa sejarah kekhalifahan kita menemukan bahwa nilai mata uang pada saat itu mengalami fluktuasi dengan nilai paling rendah pada level 1:35 sampai dengan 1:50 pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Ketika fluktuasi semakin tak terkendali, maka muncullah beberapa uang yang beredar dinamai dengan fulus. Untuk mengimbangi fluktuasi yang terjadi antara keduanya.

⁸ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007); h. 31.

Adiwarman A. Karim menambahkan bahwa perkembangan emas sebagai standar dari uang beredar mengalami tiga kali evolusi, yaitu:⁹

- a. *The gold coin standard*: di mana logam emas mulia sebagai uang yang aktif dalam peredaran.
- b. *The gold built standard*: di mana logam emas bukanlah alat tukar yang beredar namun otoritas moneter menjadikan logam emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar.
- c. *The gold exchange standard Bretton (Woods System)*: di mana otoritas moneter menentukan nilai tukar *domestic currency* dengan *foreign currency* yang mampu di-*back up* secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki. Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat telah memunculkan uang *fiducier (credit money)* yaitu uang yang keberadaannya tidak di-*back up* oleh emas dan perak.

Selain uang, yang memiliki peranan dalam moneter Islam adalah perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat vital dalam perekonomian suatu Negara, sehingga keberadaan perbankan akan menunjang perkembangan perekonomian suatu negara ke depan. Kalau keberadaan perbankan sehat, maka perekonomian suatu negara akan sehat pula. Namun sebaliknya, jika perkembangan perbankan labil, maka secara otomatis perekonomian negara tersebut akan labil pula. Karena perbankan merupakan salah satu instrumen moneter dari suatu negara.

Untuk itu, Islam menawarkan sebuah perbankan yang bebas riba, di mana riba telah terbukti menjadikan perekonomian dunia seperti karet, menggelembung dengan ketinggian angka, namun *keropos* dalam kenyatannya. Ini merupakan bukti bahwa perbankan konvensional yang selama ini beroperasi menjadi penyebab ketimpangan perekonomian di dunia ini, dengan lebih mengedepankan sistem bunga dari pada hasil sebuah investasi.

Umer Chapra mengatakan bahwa ada dua alternatif pengganti bagi pembiayaan berbasis bunga. Yang pertama adalah *qardhul hasan* dan yang lainnya adalah dengan penyertaan modal (*equity financing*). *Qardhul hasan* merupakan suatu pinjaman yang dikembalikan pada akhir periode yang telah disepakati tanpa disertai bunga. Sedangkan penyertaan modal (*equity financing*) merupakan penyertaan modal pada bisnis jangka panjang.¹⁰

Perbankan Islam yang ditawarkan merupakan kemitraan dalam sebuah masyarakat Islam yang bisa berbentuk *mudharabah* dan *syirkah*. *Mudharabah* merupakan suatu organisasi bisnis di mana pelaku bisnis (*entrepreneur*) menyediakan pengelolaan (*manajemen*), dan sumber keuangannya berasal dari pemilik dana di suatu Bank Islam (*shahibul-maal*). Sedangkan *syirkah* merupakan bentuk kerjasama beberapa orang, kemudian mengeluarkan modal bersama untuk melakukan suatu bisnis yang keuntungan dan kerugiannya akan ditanggung bersama. Inilah keindahan sistem perbankan Islam yang lebih menanamkan nilai-nilai keadilan di antara nasabahnya.

Maka dari itu, perbankan akan bisa menghasilkan sebuah keseimbangan, di mana perekonomian Islam menginginkan keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaganya adalah sistem perbankan Islami.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ M. Umer Chapra. *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000); h. 32.

¹¹ Nurul Huda et al. *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009); h. 169.

Sistem moneter Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan kepada produksi dan perdagangan, atau dikenal dengan sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang yang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar.¹²

Adiwarman A. Karim menambahkan bahwa bangunan ekonomi Islami didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tahuhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Dengan adanya nilai-nilai tersebut akan membentuk sebuah perilaku (*akhlak*) baik yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Diharapkan dengan meniadakan nilai-nilai sistem ekonomi Islam terhadap demokrasi ekonomi di Indonesia, akan membawa arah perekonomian bangsa ini pada perkembangan yang signifikan. Sehingga akan menjadikan penguatan terhadap sistem demokrasi ekonomi yang mulai ditarik pada ranah neo-liberalisme oleh para elit. Jangan sampai neo-liberalisme yang merupakan anak dari kapitalisme menjadi penyakit akut yang akan menggerogoti sendi-sendi perekonomian Indonesia. Semoga kehadiran ekonomi Islam mampu memberikan warna pada sistem demokrasi ekonomi di Indonesia.

2. Kebijakan Moneter Islami

Kebijakan Moneter Islam diharapkan akan meningkatkan produktifitas masyarakat di suatu daerah yang akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang ditandai dengan peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) secara perlahan-lahan. Dan pada akhirnya akan terciptalah stabilitas ekonomi Indonesia (*stability*). Inilah tujuan yang sebenarnya dalam sistem ekonomi Islam, yaitu menciptakan produktifitas sektor riil.

Pada perekonomian kapitalis yang menggunakan instrumen bunga, permintaan akan uang karena motif spekulasi, pada dasarnya didorong oleh fluktuasi suku bunga. Jika suku bunga turun dan ada harapan naik tidak lama lagi, biasanya akan mendorong individu atau perusahaan untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegangnya. Karena suku bunga terus berfluktuasi pada sistem perekonomian kapitalis, terjadilah perubahan terus-menerus dalam jumlah uang yang dipegang publik.

Maka tentu saja penghapusan bunga sekaligus mewajibkan membayar zakat 2,5% akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang, sehingga akan memberikan stabilitas yang lebih besar terhadap permintaan akan uang. Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi, antara lain:¹⁴

1. Karena tidak ada aset yang berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, tentu saja dengan risiko tertentu, atau mendiamkan uangnya tidak produktif tersimpan di tangannya.
2. Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang, dengan berbagai tingkat risiko, akan tersedia bagi investor tanpa memandang apakah mereka pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.

¹² *Ibid.*

¹³ Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010); h. 34.

¹⁴ Nurul Huda *et al*, *op.cit.* 2008. h. 169.

3. Kecuali dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan ada orang yang menyimpan sisa uangnya, setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga membeku begitu saja. Ia tentu lebih memilih berinvestasi pada aset bagi hasil, paling tidak untuk menggantikan dananya yang tergerus oleh zakat dan inflasi.
4. Berbeda dengan suku bunga, laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan di depan. Satu-satunya yang ditentukan di depan adalah *nisbah* bagi hasil yang tidak akan berfluktuasi, karena *nisbah* ini ditentukan oleh konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap terjadi perubahan di dalamnya akan melalui suatu negosiasi yang sangat panjang.

Oleh karena itu, kebijakan moneter yang diformulasikan dalam sebuah perekonomian Islam, adalah menggunakan variabel cadangan uang dan bukan cadangan bunga. Bank sentral harus menggunakan kebijakan moneternya untuk menghasilkan suatu pertumbuhan dalam sirkulasi uang yang mencukupi untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output selama periode menengah dan panjang, dalam kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran sosio-ekonomi lainnya.

3. Instrumen Moneter Islami

Seperti yang telah penulis sampaikan di awal bahwa uang dan perbankan merupakan instrumen moneter yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, di mana uang yang ada lebih ditekankan pada sektor riil untuk menunjang produktifitas di kalangan masyarakat. Apabila uang yang tersedia hanya digunakan di sektor moneter (*hot money*), maka akan menggoyahkan perekonomian suatu negara. Inilah mengapa ekonomi Islam lebih menekankan kepada perbankan untuk mengatur perekonomian di sektor riil.

Selain kedua instrumen di atas, dalam ekonomi Islam ada beberapa instrumen yang dijadikan alat distribusi ekonomi di kalangan masyarakat. Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi orang yang berkecukupan (*surplus asset*) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dari produksi yang dijalankan selama setahun. Sedangkan di lain sisi, sebagai insentif untuk membantu beban hidup orang-orang kurang mampu (*deficit asset*) agar dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan taraf hidupnya. Taraf hidup seseorang akan meningkat apabila produktifitas meningkat yang akan berimplikasi pada pendapatan. Euis Amalia¹⁵ menyebutnya dengan kesejahteraan, di mana kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan.

Sedangkan standar indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari moneter Islam adalah *maqasid syariah* (kebutuhan paling dasar bagi manusia: aspek agama, personal, akal, keturunan, dan harta). Dalam artian bahwa *maqasid syariah* merupakan suatu pijakan jaminan sosial yang harus ditanggung secara sukarela oleh orang-orang yang mampu (*surplus*) melalui instrumen zakat, infak, sedekah (ZIS).

Yusuf al-Qaradhawi menambahkan bahwa peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya, sehingga orang miskin tidak lagi bergantung kepada orang lain.¹⁶

¹⁵ Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008); h. 1.

¹⁶ Yusuf Qordhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul, 2005); h. 29.

Selain zakat, masih ada infak dan sedekah, yang merupakan instrumen pendukung dari keberadaan zakat. Memang nampaknya infak dan sedekah sangat sepele, akan tetapi dampak yang diberikan akan sangat terasa di kalangan orang-orang *mustad'afin*. Seandainya dikelola dan diberdayakan secara serius oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga sosial, dampaknya pun bukan hanya membantu orang-orang miskin untuk keluar dari kemelut kemiskinannya, akan tetapi juga mampu meningkatkan produktifitasnya hingga memiliki kehidupan yang layak.

Keberadaan zakat, infak, sedekah menjadi salah satu media pemerataan (*equality*) kekayaan di kalangan orang miskin, di mana orang miskin berdasarkan data HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) berjumlah 12,49% dari total penduduk Indonesia.¹⁷ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang atau 11,96 persen, sedangkan pada bulan Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang atau 12,49 persen. Kedua data tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,89 juta orang atau 0,53 persen. Adanya zakat, infak, sedekah diharapkan akan meningkatkan produktifitas orang miskin yang akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang ditandai dengan peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) secara perlahan-lahan, yang pada akhirnya akan terciptalah stabilitas ekonomi Indonesia (*stability*).

Semoga dengan adanya Ekonomi Islam yang akhir-akhir ini diperbincangkan dan dipelajari bersama, akan membawa keberkahan kepada umat manusia, sebagai salah satu bentuk *rahmatan lil-alamin* dari ajaran Islam.

B. EKONOMI ISLAM SEBAGI JAWABAN DARI PEMISKINAN SISTEMIK

Kemiskinan merupakan fenomena *sunnatullah* yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang hendak menghapus kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari, sama saja mengingkari *sunnatullah* yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Seharusnya kemiskinan bukanlah dihapuskan, akan tetapi kemiskinan haruslah diberdayakan semaksimal mungkin. Sehingga disparitas kemiskinan akan semakin menipis, pada akhirnya akan mengurangi jumlah kemiskinan yang telah berada di tubir kesengsaraan.

Namun sayang sekali, sangat sedikit rasanya masyarakat yang tergerak hatinya untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin. Sehingga masyarakat miskin sulit mengakses kesempatan usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kungkungan kemiskinan pun akan terus menyelimuti hidupnya. Padahal jika ada orang yang mampu memotong garis kemiskinan tersebut, akan melahirkan *multiplier effect* yang akan berdampak signifikan pada peningkatan pembangunan Indonesia secara komprehensif: pembangunan bersifat materi maupun non-materi.

Armatya Sen dalam buku *Development as Freedom* yang dikutip oleh Ignas Kleden mengatakan bahwa pembangunan tidak berarti lain dari usaha untuk memperluas dan memperbesar kebebasan setiap orang yang diwujudkan melalui kemerdekaan. *Pertama*, kemerdekaan substantif, yaitu hasil pembangunan harus memperbesar kebebasan. *Kedua*, kemerdekaan instrumental, yaitu sarana utama untuk mengimplementasikan pembangunan adalah juga kebebasan.¹⁸

¹⁷ Kontan, 13 Oktober 2011.

¹⁸ Daniel Sparringa dan Ignas Kleden. *Konsepsi Demokrasi* (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2012); h. 78.

Penggabungan pendekatan substantif dan instrumental terhadap kemerdekaan menghasilkan apa yang dinamakan oleh Sen *agency approach*, yaitu teori dan metode yang memperlakukan tiap individu dan tiap kelompok sosial tidak semata-mata sebagai sasaran utama pembangunan, tetapi sebagai aktor, pelaku, dan penentu pembangunan itu sendiri.

Sen mengusulkan agar kemiskinan, misalnya, tidak cukup lagi hanya memandang orang miskin sebagai pihak yang kekurangan pendapatan, makanan, atau perumahan. Sen mengusulkan agar kemiskinan dilihat pertama-tama sebagai dirampasnya kesempatan dan hak seseorang untuk mewujudkan kemampuan dan bakat-bakatnya. Sehingga hal tersebut akan terjadi pemiskinan sistemik yang tak dapat dilawan oleh orang-orang miskin. Ketidakberdayaan tersebutlah yang menyebabkan rantai kemiskinan berlanjut turun-temurun.

Yang sangat tragis, terkadang fenomena pemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat berakhir pada eksploitasi terselubung oleh orang-orang kaya (*surplus asset*). Untuk mendorong terjadinya pencitraan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan aset yang dimilikinya. Apalagi ketika datang bulan suci Ramadhan, seolah-olah eksploitasi kemiskinan sengaja dipertontonkan di tengah kehidupan sehari-hari. Lihatlah bagaimana pedihnya masyarakat miskin ketika menunggu antrean pemberian zakat dan sembako di beberapa rumah orang-orang kaya yang akhir-akhir ini diberitakan di televise. Yang paling menyedihkan terkadang pemberian donasi tersebut mencederai masyarakat miskin yang tengah mengantre, bahkan ada yang harus dirawat di rumah sakit.

Apakah kita akan tetap membiarkan eksploitasi kemiskinan selalu saja dipertontonkan setiap saat? Tentunya tidak, jika memang masyarakat kaya hendak mendonasikan harta kekayaan, entah berupa zakat, infak, sedekah, sembako ataupun berupa donasi lainnya, hendaklah diberikan dengan cara-cara yang arif dan bijaksana. Karena pemberian donasi yang mencederai penerimanya, hanya akan menurunkan mental penerima. Jika cara-cara seperti ini tetap dibiarkan subur berkembang di kalangan masyarakat kita, maka eksploitasi kemiskinan hanya akan menjadi hiburan opera bagi orang-orang kaya.

Maka dari itu, bagaimana caranya donasi yang diberikan oleh orang-orang kaya (*surplus*) mampu membangkitkan keterpurukan mental orang-orang miskin, sehingga berdampak signifikan terhadap perbaikan dan peningkatan taraf ekonomi yang dimilikinya. Pendonasian konvensional seperti itu haruslah segera dihilangkan, karena dirasa kurang tepat sasaran dan tidak bisa memberdayakan masyarakat miskin. Islam sendiri telah memperkenalkan dalam teori ekonomi dengan istilah *Baitul Maal*, di mana *Baitul Maal* di zaman modern ini lebih mengkhususkan kepada pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah. Dana tersebut apabila dikelola dengan baik dan benar, maka Insya Allah kesenjangan yang tercipta lambat laun akan semakin menipis.

C. PEMBERDAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM SEBAGAI RAHMATAN LIL-ALAMIN

Perlu ada terobosan baru untuk mengurangi disparitas sosial yang semakin akut: terciptanya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Diharapkan terobosan tersebut akan berdampak signifikan terhadap pengurangan jarak pemisah tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat miskin dengan cara pemberdayaan. Karena pemberdayaan merupakan salah satu cara yang ampuh untuk memberikan penyembuhan ekonomi kepada masyarakat miskin, baik secara mental, spiritual, maupun emosional. Kesemua hal tersebut merupakan unsur yang tak dapat dipisahkan dalam usaha pemberdayaan masyarakat miskin.

Agar pemberdayaan berdampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di dunia ini, haruslah ada sesuatu hal yang segera dilakukan, sebagai penawar untuk menahan laju pergerakan kemiskinan yang semakin akut. *Pertama*, pemberian edukasi yang berdampak pada perubahan intelektual, spiritual, dan emosional. Diharapkan ketiganya mampu membentuk paradigma baru dalam diri orang-orang miskin, sehingga orang-orang miskin memiliki *ghirah* (semangat) untuk bangkit dari keterpurukan ekonominya. Maka dari itu, diharapkan edukasi tersebut akan melahirkan sikap positif dari orang-orang miskin.

Kedua, pendampingan intensif. Dalam artian bahwa keterpurukan masyarakat miskin disebabkan kelemahan mental yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendampingan untuk mengembalikan mentalnya sangatlah penting sekali, di mana dalam pendampingan tersebut, orang-orang miskin dibekali dengan memberikan *talent* (bakat), *attitude* (sikap), *skill* (kecakapan), *knowledge* (pengetahuan) menjadi sebuah kesatuan yang integral.

Talent dan *attitude* merupakan sesuatu yang harus ditumbuhkembangkan terlebih dahulu dalam diri orang miskin. Keduanya merupakan hidayah Allah SWT yang harus dirangsang dengan menjalankan amalan-amalan baik, seperti menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Sehingga hal tersebut akan melahirkan karakteristik pribadi yang akan menjadikan dirinya lebih tangguh daripada sebelumnya. Ciri khas manusia yang memiliki *talent* dan *attitude* akan memiliki sifat *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah* seperti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mereka menjadikan pekerjaannya sebagai ladang amal yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Sedangkan *skill* dan *knowledge* menjadi pelengkap bagi terciptanya manusia tangguh yang berkualitas. Dengan kecakapan dan pengetahuan yang memadai, manusia tangguh tersebut akan mampu bersaing dengan yang lainnya. Maka dari itu, diharapkan pendampingan yang dilakukan akan mampu merangsang lahirnya *talent*, *attitude*, *skill* dan *knowledge*.

Ketiga, pemberian modal usaha melalui Lembaga Keuangan Syariah. Langkah konkret selanjutnya yang harus dijalankan adalah memberikan modal usaha secara *step by step*. Dalam artian bahwa masyarakat miskin haruslah diberi modal sesuai dengan kapasitas dirinya. Diharapkan pemberian modal usaha tersebut akan merangsang semangat dirinya untuk keluar dari keterpurukan yang menimpa dirinya, di mana penyaluran modal yang dilakukan melalui *intermediary* (perantara) Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya melalui perbankan syariah, entah yang berbentuk *micro banking* (BPRS) ataupun *micro finance* (koperasi syariah, BMT, dan lain-lain). Fungsi dari perbankan syariah tersebut adalah sebagai mediasi antara masyarakat

yang memiliki dana (*surplus asset*) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan melalui *micro banking* ataupun *micro finance*.

Penyaluran permodalan melalui *micro banking* ataupun *micro finance* adalah untuk mempermudah klarifikasi manakah masyarakat yang benar-benar membutuhkan permodalan dan mana yang tidak. Sehingga permodalan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya.

Mekanisme permodalan yang disalurkan tergantung kepada sumber perolehan dana itu sendiri. Dalam artian jika dana tersebut berasal dari investasi masyarakat (*surplus asset*) melalui tabungan, deposito, atau giro, maka dana tersebut harus dikembalikan. Akadnya bisa menggunakan *mudharabah* atau *musyarakah* dengan sistem bagi hasil. Sedangkan apabila dana yang disalurkan berasal dari dana sosial (zakat, infaq, sedekah, waqaf, hibah) maka dana tersebut bisa tidak dikembalikan dan boleh juga dikembalikan pokoknya tanpa harus meminta bagi hasilnya. Tergantung mekanisme pengelolaan yang sekiranya akan memberikan dampak baik bagi penerimanya.

Keempat, menumbuhkembangkan nilai-nilai gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari. Karena gotong-royong merupakan nilai luhur yang harus ditumbuhkembangkan. Namun nilai-nilai tersebut luntur perlahan-lahan. Seolah tergerus perubahan zaman yang sangat masif. Bayangkan saja jika gotong-royong mampu kita implementasikan dalam pengentasan kemiskinan dengan cara setiap orang menyumbang seribu setiap hari atau setiap minggu, penulis yakin orang-orang miskin akan mampu ter-cover dari dana tersebut. Inilah mengapa penulis sangat mewanti-wanti untuk menghidupkan kembali nilai-nilai gotong-royong dalam kehidupan sehari-hari.

Gotong-royong tersebut berupa pemberian donasi oleh umat Islam yang berkecukupan (*surplus asset*), melalui mekanisme zakat, infaq, sedekah, waqaf, hibah, di mana potensi dana zakat saja dalam setahunnya bisa mencapai Rp 200 trilyun dan apabila ditambah dengan infaq, sedekah, waqaf, hibah, maka akan lebih besar daripada Rp 200 trilyun. Tapi dari potensi tersebut, setiap tahunnya hanya bisa terkumpul sebanyak Rp 2 trilyun saja.¹⁹ Maka dari itu, tugas umat Islam adalah untuk meningkatkan donasi sosial tersebut sebagai salah satu cara mengimplementasikan *rahmatan lil-alam* di bidang ekonomi.

Sudah saatnya kita hilangkan eksploitasi kemiskinan yang ada di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Karena eksploitasi kemiskinan sangatlah tidak berprikemanusiaan. Salah satu obat penawar yang bisa dilakukan untuk menghadang eksploitasi adalah pemberdayaan. Karena pemberdayaan merupakan penyembuhan ekonomi yang sangat signifikan, dimulai dari akar rumput kemiskinan tersebut.

Seperti itulah pemberdayaan untuk keluar dari kemiskinan yang diajarkan dalam sistem ekonomi Islam, di mana pemberdayaan dilakukan secara komprehensif, yaitu

¹⁹ Disampaikan oleh Ahmad Nuryadi Asnawi, selaku *Sharia Compliance* Bank Muamalat Indonesia, saat memberikan pembekalan kepada Relawan Ramadhan Baitulmaal Muamalat (BMM) pada tanggal 18 Juli 2012.

pemberdayaan bersifat materi dan non-materi. Sehingga bukan saja menghilangkan kemiskinan, akan tetapi mampu memotong garis kemiskinan itu sendiri.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk transformasi *rahmatan lil-alam* yang terdapat dalam ajaran Islam, di mana ajaran yang terkandung di dalamnya lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan tersebut diterjemahkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada sesama manusia untuk memajukan sektor riil. Sehingga kesempatan tersebut akan berimplikasi pada pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi tersebutlah yang akan menjadi penawar dari konflik ekonomi yang selama ini terjadi. Sehingga resolusi konflik akan mampu dibendung dengan menggunakan ekonomi Islam yang membawa pesan *rahmatan lil-alam*.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, ekonomi Islam bisa menjadi solusi dan juga alternatif sistem perekonomian yang selama ini ada. Seperti yang kita ketahui, sistem demokrasi ekonomi yang selama ini dianut telah dibajak oleh neoliberalis-kapitalisme. Sehingga sistem demokrasi ekonomi tak mampu menjawab tantangan dan problematika yang setiap saat datang. Maka peranan ekonomi Islam bukan untuk menggantikan demokrasi ekonomi, akan tetapi diharapkan mampu meniupkan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam ke dalam demokrasi ekonomi. Sehingga akan terjadi sinergitas, atau di dalam bahasa Alquran disebut *yasyuddu ba'duhu al-ba'da* (saling kuat-menguatkan), yang pada akhirnya akan mampu mentransformasikan nilai-nilai seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu nilai-nilai kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

B. Saran

Setelah menguraikan ekonomi Islam sebagai *rahmatan lil-alam* yang sebenarnya hendak membawa seluruh pengikutnya mendapatkan *falah*, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka sudah sepatutnyalah menjadikan ekonomi Islam sebagai sebuah alternatif dan juga solusi untuk meregang konflik yang selama ini melanda Indonesia pada khususnya, dan juga dunia pada umumnya. Ada beberapa hal yang hendak penulis sarankan, agar ekonomi Islam mampu memberikan *Rahmatan lil-alam*:

1. Hendaknya setiap individu muslim mampu mentransformasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, sehingga nilai keadilan yang terdapat dalam ekonomi Islam terwujud, yang kemudian mampu mengurangi disparitas konflik ekonomi antara masyarakat kaya (*suplus asset*) dengan masyarakat miskin (*deficit asset*). Sehingga berimplikasi pada *falah*, yaitu sebuah kesejahteraan di dunia dan akhirat.
2. Bagi individu yang berada dalam lingkup pemerintahan (*state society*), sudah seharusnya mampu meniupkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem demokrasi ekonomi, sehingga kehadiran ekonomi Islam mampu meredam dan bahkan memotong neoliberalis-kapitalisme yang selama ini telah menggerogoti tubuh pemerintahan dan telah menciptakan konflik elit di tubuh pemerintahan.
3. Menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa agama Islam merupakan agama *rahmatan lil-alam* yang membawa pesan kedamaian dan keadilan, melalui praktik ekonomi (*muamalah*) dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tendensi negatif yang selama ini ditundingkan kepada umat Islam mampu dipatahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Chapra, M. Umer. *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000).
- Huda, Nurul *et al.* *Ekonomi Makro Islami: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2009).
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Nazin, Muhammad. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Prasetyantoko, A. *Modul Literasi Ekonomi* (Jakarta: Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, 2012).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam* (Jakarta: Grafindo, 2008).
- Suryabrata, Sunadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004).
- Sparringa, Daniel dan Kleden, Ignas. *Konsepsi Demokrasi* (Jakarta: Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi, 2012).
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul, 2005).
- Yunus, Muhammad (Diterjemahkan oleh Irfan Nasution). *Bank Kaum Miskin* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007).
- Kontan, 13 Oktober 2011.